

# Kebangkitan Lokal di Aceh: Pembentukan Identitas Keacehan, Reaktualisasi Ruang Publik dan Penguatan Kearifan Lokal Pasca Konflik dan Tsunami

Oleh:

**Ibnu Mujib**

Mahasiswa S3 Prodi Agama dan Lintas Budaya UGM

**Irwan Abdullah**

Guru Besar UGM

**Heru Nugroho**

Guru Besar FISIP UGM

Diterima redaksi tanggal 12 Juni 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 25 Agustus 2014

## Abstract

*This paper explores the new form of Acehnese identity that has inspired the revival of the local in Aceh. Two important points will be explored in this paper: 1) the idea of a new Aceh and 2) how this Aceh revivalism is formulated from within. This paper studies the process of dialogue and renegotiation of local wisdom and practices and Acehnese identity in public space.*

*This study shows that the renegotiation of public spaces that were essentially demolished due to the former conflict and the tsunami is now being rebuilt to revive the social bases that had been lost. The discourse of local wisdom has been implemented through the Qonun to maintain and implement Aceh's intellectual heritage. This communal consciousness has been actively built by many actors through various forms of dialogue and negotiation. It is thus not surprising to see an upsurge in meunasahs, gampong activities, the revival of the mosque as the center of Islamic studies, and even the centering of coffee shops in Acehnese identity. These activities are all part of the idea of Aceh revival.*

**Keywords:** *Acehnese Identity, Local Wisdom, Dialogue and Negotiation*

## Abstrak

Paper ini mempertanyakan tentang wujud Aceh baru yang menjadi inspirasi kebangkitan lokal di Aceh. Dua hal penting yang akan mendukung tesis, bagaimana gagasan Aceh baru/kebangkitan Aceh dirumuskan dari dalam. Setidaknya penguatan ruang publik sebagai basis pengelolaan kearifan lokal menjadi wacana penting dalam mengukur indikator berlangsungnya kebangkitan lokal di Aceh. Selain itu, proses pembentukan identitas keacehan juga menjadi salah satu pertanyaan penulisan paper ini, di mana praktiknya telah menandai ujung dari kebangkitan lokal yang sedang dirumuskan di Aceh. Oleh karena itu, proses-proses dialog, maupun negosiasi seperti apa yang berkembang di Aceh akan dibahas dalam penulisan ini.

Studi ini menunjukkan bahwa renegotiasi ruang-ruang publik yang selama ini tenggelam oleh karena konflik dan tsunami, kini dibangkitkan kembali untuk menghidupkan basis-basis sosial yang telah hilang dan bahkan mengabur. Kearifan lokal wacananya sudah sampai penerapan kebijakan melalui qonun sebagai bentuk pemeliharaan warisan intelektual Aceh yang harus terus dihidupkan dan diimplementasikan. Kesadaran komunal yang dibangun oleh banyak aktor ini faktanya telah terintegrasi melalui berbagai bentuk dialog dan negosiasi yang panjang. Sehingga tidak heran jika belakangan ini di meunasah-meunasah, aktifitas-aktifitas gampong, menghidupkan masjid sebagai pusat kajian Islam, serta bahkan warung kopi pun menentukan arah identitas keacehan yang sedang dibangun, terutama sebagai gagasan Aceh bangkit.

**Kata Kunci:** *Identitas Keacehan, Kearifan Lokal, Dialog dan Negosiasi*

## Pendahuluan

Kondisi sosial pasca konflik dan tsunami di Aceh menandai keterbukaan masyarakat Aceh dalam aspek sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pemikiran dan wacana publik masyarakat Aceh, pergeseran perilaku sosial, disorientasi nilai-nilai lokal, demokratisasi politik, berkembangnya gaya hidup anak muda yang kebarat-baratan, hingga bagaimana cara masyarakat memecahkan persoalan hidupnya. Pertemuan budaya lokal dan global telah memberi pelajaran berharga bagi masyarakat lokal, tidak saja dalam bidang ekonomi-politik dan keamanan, tetapi juga di bidang sosial-budaya (Friedmen, 1991: 134). Hadirnya berbagai negara-negara donor, NGO internasional, para sektor swasta di Aceh merupakan salah satu tanda pelibatan agensi-agensi internasional dalam program-program *recovery* pasca tsunami. Oleh karena itu, hubungan lokal-global dalam hal ini tidak saja menjembatani proses *recovery*, tetapi juga sampai pada bagaimana tatanan lokal ikut didefinisikan, dikonstruksi, bahkan diimplementasikan.

Fakta ini menguatkan asumsi tentang longgarnya struktur identitas ke-Aceh-an pada masa transisi. Misalnya, kekuatan-kekuatan lokal yang dulunya dilakukan dengan sistem kolektif kini di sebagian aktifitas dijalankan dengan cara sendiri atau individu-individu. Sistem gotong royong yang menjadi salah satu bentuk kearifan tradisional masyarakat kemudian berubah menjadi praktik *cash for work*, suatu praktik yang ditawarkan sebagian besar NGO atau lembaga internasional. Di warung-warung kopi yang dulu hampir sepi dari kegiatan perempuan, sekarang tidak sedikit perempuan yang ikut dalam kegiatan di warung-warung kopi dengan *style* pemakaian jilbab setengah kepala.

Munculnya gaya hidup konsumtif, dan meninggalkan kesederhanaan juga nampak, misalnya sebelum tsunami, orang Aceh berbelanja cukup di wilayah Aceh sendiri, tetapi pasca tsunami anak-anak muda Aceh lebih memilih belanja ke Jakarta, Bali, Malaysia, Singapura, dan lain-lain (Mujib, 2010: 87).

Selain itu, LSM lokal juga mengalami disorientasi yang disebabkan oleh kesibukan dengan kegiatan penanggulangan bencana sehingga tidak fokus pada mandat organisasi mereka. LSM telah kehilangan anggota eksekutif mereka karena direkrut oleh organisasi-organisasi bantuan internasional di Aceh. Bahkan meningkatnya harga-harga pasar (barang-barang, gaji dan kendaraan) membuat mereka sangat kesulitan dalam memenuhi biaya operasional mereka sehari-hari (USAID, OCHA, MISPI, 2005).

Di tengah pergeseran identitas ke-Aceh-an tersebut, fakta lain justru menunjukkan sebaliknya bahwa asumsi di atas hanya berlangsung beberapa tahun *pertama* yaitu pada saat Aceh mengalami masa-masa transisi akibat tsunami. *Kedua*, basis-basis budaya di tingkat lokal mulai menguat pada saat identitas lokal ke-Aceh-an mengalami disorientasi. Hal ini ditandai dengan menguatnya kembali pusat-pusat kebudayaan, seperti adanya kegiatan-kegiatan pemberlakuan Syariat Islam di desa-desa, agenda kegiatan kelembagaan adat yang mengarah pada advokasi nilai lokal di tingkat *gampong* dan *mukim*, dan menguatnya kembali LSM-LSM lokal setelah mengalami stagnasi pasca tsunami Aceh. Selain itu LSM lokal juga tidak sedikit yang *concern* pada isue-isue kearifan lokal seperti halnya berbagai kegiatan keadatan dan budaya di tingkat *mukim* yang menjadi agenda utama Jaringan Kebudayaan Masyarakat Aceh (JKMA). Adanya indikator-indikator semacam ini telah menunjukkan apa yang peneliti sebut sebagai kebangkitan lokal pasca konflik dan tsunami, sebuah

konstruksi identitas ke-Aceh-an yang melibatkan agensi-agensi serta aktor sosial-politik yang sangat beragam.

Namun demikian, di sisi lain, globalisasi di Aceh juga makin tidak bisa dibendung terlebih fenomena globalisasi tersebut tidak saja terjadi di kota, tetapi juga sudah menjalar ke desa-desa. Desakan kultur global yang meluas pada masa-masa transisi pasca tsunami telah memberi pengaruh pada kehidupan sosial-budaya masyarakat secara masif, tidak saja berpengaruh dalam hal sistem nilai, sistem keyakinan, dan identitas, tetapi juga berpengaruh pada gaya hidup. Oleh karena itu, fakta tentang menguatnya kultur global di Aceh harus dimaknai sebagai tantangan tersendiri di Aceh. Momentum inilah yang memperlihatkan sebuah fakta baru yaitu sisi lain dari tsunami Aceh 2004, sebuah fakta mengenai kebangkitan lokal yang mencoba menjawab persoalan atau tantangan global sekaligus sebagai langkah memadukan dua kepentingan antara lokal dan global. Mengenai hal tersebut, Badruzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh menyebutkan bahwa saat ini Aceh menunjukkan semangat kebangkitan keacehan pasca tsunami terutama bergerak pada isu-isue kebudayaan dan hukum, pariwisata, kesenian, fashion, dan bidang jasa, di mana isinya dikembalikan pada semangat keacehan yang tertanam dalam kerangka agama dan adat Aceh dengan tetap menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan pendukung yang ada, termasuk globalisasi (Wawancara dengan Badruzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, 15 September 2012). Bandingkan dengan wawancara peneliti dengan informan yang sama yaitu Badruzaman Ismail pada tahun 2009 yang mengungkap berbagai penangan adat di tingkat *Munasah* dan *Gampong*.

Di tingkat ini nilai-nilai budaya lokal masih dapat dibilang belum banyak terkontaminasi oleh budaya global, karena itu harus dipertahankan yaitu dengan cara advokasi nilai-nilai budaya khususnya pada anak muda di tingkat *Gampong* dan *munasah* di wilayah Banda Aceh (Laporan penelitian hibah agama dan bencana, CRCS-UGM tahun pertama, 2010).

Di sisi lain konstruksi identitas ke-Aceh-an menjadi konteks yang tidak dapat dipisahkan di tengah kontestasi berbagai latar belakang agensi yang ada, khususnya di Banda Aceh. Munculnya beragam aliran Islam, praktik-praktik kekerasan pada perempuan, penyesatan atas pandangan maupun aliran lembaga keagamaan tertentu misalnya di Aceh adalah bias yang sesekali harus dibaca lewat pemahaman-pemahaman politis dan kekuasaan semacam ini. Persepsi suatu kelompok di dalam masyarakat yang kompleks akan melahirkan batas-batas atau teritori identitas bagi kelompok yang lain. Oleh karena itu, peluang konflik akan menjadi lebih terbuka pada saat berbagai bentuk persepsi muncul secara masif, menjustifikasi kelompok yang lain, belum lagi jika malah memunculkan klaim-klaim yang sengaja direproduksi secara terus menerus tanpa ada klarifikasi.

Untuk itu, belajar memahami identitas kelompok yang lain adalah bagian yang penting untuk menghilangkan persepsi negatif (Appadurai, 1994: 101) dengan cara menumbuh-kembangkan tradisi dialog yang disertai negosiasi-negosiasi di berbagai struktur lapisan antar komunitas, diversitas budaya, bahkan antar partai-partai politik melalui penguatan dan reaktualisasi ruang-ruang publik di Aceh.

Apa yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini, baik konflik yang disebabkan

oleh faktor ekonomi politik, – sebagai warisan konflik lama dengan bentuk baru – meluasnya krisis kebudayaan dan identitas Aceh, beragam bentuk krisis moral yang menyebabkan anutan-anutan sistem tradisional memudar. Hal tersebut, selain diakibatkan oleh mobilitas internasional yang terjadi di Aceh pasca tsunami juga merupakan bagian integral dari perubahan sosial di Aceh atau disebut deterritorialisasi budaya (Abdullah, 2006: 136). Di samping itu, pergeseran praktik-praktik sosial, seperti melemahnya ikatan-ikatan tradisional, serta komunalisme yang telah lama retak juga bagian dari indikator yang melekat pada jantung perkembangan perilaku kultural di Aceh (Abdullah, 2005:11). Bahkan, munculnya identitas baru baik yang berkembang melalui praktik primordialitas maupun yang dipaksakan dengan hukum-hukum modernitas pada perkembangan terakhir, telah ikut mempertanyakan otoritas berbagai agensi dan para aktor yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik dan tsunami di Aceh.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana identitas lokal Aceh yang sedang diperebutkan melalui kontestasi berbagai aktor dan agensi ini dapat direproduksi dan menjadi nilai anutan yang berpihak pada kearifan lokal masyarakat Aceh, khususnya nilai-nilai keadatan dan keagamaan Aceh yang telah lama menjadi ideologi kerakyatan (*popular ideology*) bagi masyarakatnya (Ali, 2006: 4). Oleh karena itu, studi ini selanjutnya akan menakar kekuatan dan potensi ruang publik di Aceh untuk penguatan kearifan lokal dan sekaligus identitas lokal yang kini perkembangannya sedang disandera oleh kekuatan-kekuatan global, dan aktor serta agensi lainnya termasuk masyarakat, negara dan pasar.

## Aceh Pasca Konflik dan Tsunami

Era kebebasan dan keterbukaan pasca konflik dan tsunami Aceh merupakan simbol peradaban baru masyarakat Aceh, sekaligus indikator penanda terjadinya pergeseran pada ranah suprastruktur, termasuk di dalamnya nilai-nilai ke-Aceh-an yang kini sedang menemui masa disorientasi. Berbagai bentuk struktur nilai-nilai tradisional, keagamaan, keadatan, hingga pada sub-kultur masyarakat Aceh kini sedang mengalami redefinisi atau apa yang kerap kali disebut mengalami transformasi secara meluas. Bahkan kebebasan pasca konflik juga dipahami sebagai pembudayaan nilai baru yang terkadang berhadap-hadapan dengan nilai-nilai asli (*indegenius values*).

Tantangan nyata pada era global di Aceh adalah semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat akan dunia global secara umum. Tantangan global yang dihadapi masyarakat Aceh dapat dirumuskan dalam studi ini, antara lain: *Pertama*, sikap individualisme, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudarnya solidaritas dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong, dan sebagainya. *Kedua*, sumber referensi ketokohan generasi muda tidak lagi kepada para pejuang, ulama, dan jati diri bangsanya yang memiliki peran penting bagi sebuah nasionalisme kelokalan/kebangsaan, melainkan bergeser pada lebih mengenal dan mengidolakan artis, bintang film, dan pemain sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya. *Ketiga*, banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi

atau falsafah negaranya, bahkan kesukumannya. Mereka sudah tidak tertarik lagi menjadikannya sebagai sumber anutan, bahkan lebih cenderung bersifat kritis dengan cara membandingkan dengan ideologi lain yang dianggap lebih baik dan tepat. *Keempat*, adanya diversifikasi masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional (mengglocal). *Kelima*, keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan, pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Kelima tanda perubahan sosial di atas merupakan bagian yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kontemporer saat ini. Tidak saja berlangsung pada ranah generasi mudanya, melainkan juga generasi aktif yang masih mengikuti perkembangan-perkembangan modernitas. Terlepas dari siapa yang menjadi pelaku sejarah dalam perubahan sosial belakangan ini di Aceh, paling tidak bias perubahan itu juga dapat dilihat dalam praktik-praktik masyarakat sebagai berikut: *fashion* anak muda perempuan Aceh misalnya, praktik komodifikasi semacam ini juga bagian dari dampak yang diakibatkan oleh meluasnya globalisasi di Aceh. Selain itu, tradisi silaturahmi tatap muka dengan berkunjung kepada famili yang menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya misalnya harus digantikan dengan keberadaan handphone, facebook, twitter, dan lain-lain yang kehadirannya mau tidak mau telah dipaksakan oleh suatu keadaan. Keadaan semacam ini yang menyebabkan nilai-nilai tradisional

yang muncul sebagai bentuk identitas lokal masyarakat akan mengalami kelumpuhan. Inilah apa yang dalam teori sosial disebut sebagai “hegemoni global” (Rais, 2008: 62), di mana dengan tanpa sengaja sebuah pengaruh kultur global menyebabkan sendi-sendi kehidupan lokal dikuasai oleh kekuatan global, yakni para pengendali kapital yang berkembang sampai detik ini.

Tanda dari sebuah gejala sosial di atas, disadari atau tidak, persoalannya akan menjadi krusial ketika berlawanan dengan nilai-nilai lokal yang telah terbangun lama dan berlangsung di dalam suatu masyarakat Aceh. Bahkan yang demikian ini dapat muncul secara meluas ketika: *Pertama*, sistem dan kontrol sosial dalam masyarakat mulai melemah. *Kedua*, tidak adanya suatu kekuatan dari dalam yang menginisiasi bentuk-bentuk revitalisasi nilai-nilai lokal. *Ketiga*, tidak berfungsinya ruang-ruang publik secara maksimal sehingga kegunaannya justru dimanfaatkan oleh produk-produk kapital yang menghiasi praktik sosial masyarakat Aceh belakangan ini secara meluas. *Keempat*, nilai tawar masyarakat rendah sehingga negosiasi identitas yang dilakukan juga sangat terbatas. *Kelima*, terlepas dari keempat persoalan di atas, harus diakui bahwa globalisasi tidak saja menawarkan produk-produk global, melainkan ia juga mengajari masyarakat akan kemerdekaan individu dan itu artinya sebuah pembelajaran dalam mengelola kearifan lokal.

Untuk mengidentifikasi bagaimana identitas ke-Aceh-an mengalami perkembangan pembentukannya dari waktu ke waktu, di bawah ini akan diuraikan secara singkat peta perkembangan pembentukan identitas ke-Aceh-an dari sebelum sampai setelah tsunami.

### **Peta Perkembangan Pembentukan Identitas Keacehan Sebelum dan Sesudah Tsunami**

Penjelasan tentang sejarah ke-Aceh-an merupakan suatu hal yang dinilai penting untuk melihat aspek-aspek geneologis identitas keacehan, bagaimana identitas itu dikonstruksi pada masa-masa kolonial hingga pasca kolonial, termasuk masa-masa yang paling sulit bagi masyarakat Aceh sendiri yaitu menjadikan negara sendiri sebagai musuh (*enemy*) yang berlangsung puluhan tahun, yang kemudian disudahi dengan gelombang tsunami 2004 yang maha dahsyat itu. Studi ini akan menjelaskan tema-tema sentral yang dinilai cenderung atau dominan berpengaruh pada konstruksi identitas keacehan selama ini.

Dalam hal ini peneliti akan memetakan sejarah perjalanan identitas ke-Aceh-an masyarakat Aceh melalui empat kajian pokok di antaranya: a). Ke-Aceh-an yang dibangun pada masa-masa kolonial, b). Ke-Aceh-an yang dilekatkan dengan ke-Melayu-an atau konstruksi budaya Melayu, c). Ke-Aceh-an yang melembaga dalam konstruksi keagamaan atau Islam dalam hal ini, dan selanjutnya, d). Ke-Aceh-an yang direproduksi melalui tatanan-tatanan modernitas. Empat kerangka pembentuk identitas keacehan ini menurut peneliti mewakili penjelasan kajian-kajian yang memenuhi unsur-unsur pembentukan identitas secara teoritis baik dalam konsepsi-konsepsi sejarah sosial-politik, budaya, aktor, sampai dengan kerangka fenomenologis, yang di dalamnya terdapat rumusan bahasa, perilaku maupun nilai-nilai budaya setempat. Oleh karena itu, selanjutnya akan diuraikan bagaimana identitas ke-Aceh-an telah direpresentasi oleh setiap kerangka pokok perubahan. Keempat hal tersebut antara lain: *Pertama*, identitas ke-Aceh-an sebagai konstruksi kolonial. Setidaknya telah diwakili oleh tiga episode penting sekaligus bersejarah bagi masyarakat Aceh (Reid, 2005: 63).

Episode pertama, masa pendudukan Portugis yang bermarkas di Pidie yaitu pada abad 16. Episode kedua, Aceh dalam masa perang melawan Belanda pada tahun 1873. Dalam beberapa hal, masa inilah yang biasa orang menyebutnya dengan "Perang Aceh" (1873-1942). Dalam hal ini, Aceh juga memiliki soliditas hubungan di antara para elit lokal seperti kekuatan yang dimiliki oleh Sultan sendiri, kemudian Uleebalang (kaum aristokrat), serta yang tidak bisa ditaklukkan begitu saja yaitu kekuatan Ulama. Dengan tiga kekuatan besar inilah kemudian perang ini dinyatakan sebagai ekspedisi yang gagal oleh Belanda. Kemudian tidak lama setelah itu, Belanda melancarkan ekspedisi kedua pada bulan Desember tahun 1873 dan akhirnya berhasil mengalahkan Aceh atas peranan dan saran hasil penelitian C. Snouck Hurgronje dengan pecahnya tiga kekuatan civil society (Sultan, Uleebalang, dan Ulama) (Alfian, 1992: 122). Episode ketiga, masa pendudukan Jepang. Pada perkembangan inilah Aceh mengalami kemunduran atau kehancuran. Roda kekuasaan pada kesultanan dianggap tidak mampu melawan kekuatan Jepang, tidak saja pada aspek pelemahan perekonomian Aceh, tetapi pada saat yang sama terjadi peminggiran identitas dan praktik-praktik keagamaan Aceh sebagai target misi besar Jepang. Sehingga tidak heran jikalau Aceh sudah dikenalkan dengan praktik intoleransi atau perilaku radikal dalam keagamaan.

*Kedua*, identitas ke-Aceh-an sebagai konstruksi Melayu. Di sini dijelaskan bagaimana dalam sisi yang lain identitas keacehan juga dibentuk oleh narasi-narasi Melayu, baik perannya sebagai representasi "outsider" maupun kemungkinan kemungkinan "insider" yang secara geneologis ke-Melayu-an lahir dari rahim etnisitas Melayu yang ada di Aceh. Di Malaysia sendiri etnik Melayu sudah mulai bergeser ke arah nasionalisme dan ideologi. Sementara

Menurut pemahaman umum di Malaysia, orang Melayu adalah mereka yang lahir sebelum 1957, beragama Islam, dan berbahasa Melayu (Kamarruzzaman, 2009: 67).

Beberapa contoh yang menandai keberadaan peradaban melayu di Aceh diantaranya: sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Lamuri, Daya (1520), Pidie (1521), dan Pasai (1524), selain kerajaan Islam melayu juga mengejawantah dalam bentuk sastra atau hikayah Aceh, seperti Bustan as-Salatin (karya Nuruddin ar-Raniri), kitab Hikayah Akhbarul Karim yang berisi tentang ajaran ketuhanan dan fiqh, dan masih banyak bentuk-bentuk hikayah yang lain. Bahkan sebelum Islam masuk ke Aceh, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara untuk berdagang, tetapi tidak begitu berkembang karena pada zaman sebelum Islam perdagangan di Aceh tidak meluas pasarnya, tetapi setelah masuknya Islam keadaan perdagangan di Aceh maju dan berkembang serta pasarannya pun tersebar ke pelabuhan-pelabuhan antar bangsa (Naquib alAtas, 1990:57). Kedatangan Islam membawa pengaruh besar di Aceh, baik dalam bidang bahasa maupun kesusasteraan, karena sumbangan agama Islam dalam pembentukan dan perkembangan bahasa Melayu sangat besar, yaitu dengan meningkatkan tarafnya sebagai alat pengucapan intelektual dan sekaligus sebagai "*Lingua Franca*" untuk berhubungan dengan berbagai suku bangsa di Aceh (Timoty, 2006: 29).

*Ketiga*, identitas ke-Aceh-an sebagai konstruksi Islam. Pengaruh Islam di Aceh justru diperdebatkan dari perspektif geneologinya apakah Islam Aceh di bawa/datang dari Arab Timur Tengah, Melayu, atau bahkan Persia. Masing-masing akan menentukan mazhab Islam yang kini dipeluk oleh orang Aceh. Terlepas dari mazhab Islam di Aceh, Islam secara umum hampir menjadi identitas

tunggal yang tidak ada tandingannya di Aceh, bahkan Islam menjadi ideologi kerakyatan (*populer ideology*) (Ali, 2006: 7). Islam di Aceh tidak saja tercermin dari teks fisik kuantitatif kependudukan yang menunjukkan muslim mayoritas, tetapi Islam juga menjadi kerangka anutan baik dari konteks sosial, budaya maupun politik masyarakat Aceh, termasuk disandingkannya Islam dan adat menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan di Aceh dan pemberlakuan perda/qanun Syariat Islam yang merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari ke-Aceh-an sebagai konstruksi Islam, terlepas apakah mazhab ini sebagai bentuk konstruksi negara (*state construction*) maupun suatu yang sifatnya kehendak komunal (*being communal*) masyarakat Aceh. Sampai pada batas itu, munculnya mazhab atau aliran-aliran Islam di Aceh yang juga bagian dari fakta yang harus dilihat sebagai objek material pluralitas kebudayaan Islam Aceh (Aspinal, 2009:104).

*Keempat*, identitas ke-Aceh-an sebagai konstruksi modernitas. Ke-Aceh-an sebagai konstruksi modernitas ini dapat dilihat dari konteks historis maupun aspek budaya Aceh yang belakangan berkembang. Kebijakan-kebijakan Orde Baru salah satunya yang telah memaksa suatu keadaan Aceh mengalami ketidakadilan, peminggiran identitas, sampai tekanan-tekaanan politik akibat kesewenang-wenangan rezim kekuasaan orde baru (Hadi, 2007: 48). Selain itu, konteks modernitas juga ditunjukkan dengan hadirnya *memorandum of understanding* sebagai peletak dasar perdamaian dan demokratisasi politik Aceh yang sampai saat ini masih dalam proses menjaga perdamaian (*peace keeping*) (Kingsbury, 2006: 33). Selain sebagai proses budaya perdamaian, Aceh juga sangat kental dengan intervensi politis, keterlibatan dunia internasional juga ikut saling mendefinisikan identitas ke-Aceh-an. Di sinilah masa depan Aceh

akan ditentukan oleh siapa dan dalam kapasitas apa mereka berpihak terutama dalam proyek-proyek perdamaian Aceh, termasuk aktor-aktor negara, pasar dan masyarakat akan menjelaskan dan bahkan ikut merekonstruksi ke-Acehan. Oleh karena itu, secara teoritis siapa yang memiliki modal yang kuat dialah yang akan dominan meredefinisi identitas keacehan (Bourdieu, 1993).

Euforia kebebasan dan keterbukaan yang terjadi pasca konflik dan tsunami juga dapat dilihat ketika bagaimana proses rehab-rekon (*rehabilitation and reconstruction process*) ikut menciptakan *angle* dalam merumuskan konstruksi identitas Aceh. Apa yang disebut sebagai disorientasi identitas hampir dialami oleh masyarakat Aceh, meski kemudian dibangkitkan kembali melalui konsep-konsep dan gagasan Aceh baru yang dikembangkan baik melalui wacana tentang penguatan Aceh sebagai subjek studi tersendiri atau apa yang disebut (Acehnologi), sampai pemberlakuan Qonun Aceh (PERDA) dan UUPA. Tiga momentum di atas telah mempengaruhi konstruksi identitas Aceh mulai dari masyarakat yang dipinggirkan secara politik, maupun kultural sampai pada masyarakat Aceh yang kini secara berlahan-lahan merasakan kemerdekaan berpolitik dan berbudaya.

### **Reaktualisasi Ruang Publik Sebagai Gagasan Aksi Dari Dalam**

Ruang publik merupakan entitas ruang yang memiliki nilai historisitas, identitas, serta bahkan soliditas personal bagi pemiliknya, ia akan menjadi cair, longgar dan bahkan sangat strategis, karena ia terus menerus diredefinisi makna dan fungsinya. Sehingga tidaklah heran jika kemudian ruang publik menjadi ruang bersama dalam identitas, budaya, sampai bahkan kepentingan yang berbeda. Batas-batas kebudayaan tampak

mencair, berbagai bentuk negosiasi, penyelesaian konflik, transaksi bisnis, dan juga termasuk konsolidasi partai sekalipun dapat diselesaikan di dalam ruang kebudayaan semacam ini. Hal demikian itu, relatif mampu dilakukan tidak saja dalam ruang-ruang formal tapi lebih sebagai kerangka informal yang mungkin akan menjadi aset baru bagi tumbuhnya potret kearifan lokal yang penting bagi kehidupan masyarakat Aceh (Brubaker, 2004: 67) termasuk juga bentuk bentuk ruang publik lainnya di Aceh.

Kearifan lokal yang dibangun sebagai ideologi budaya di Aceh membutuhkan simbol-simbol identitas yang tentunya tidak saja diterima oleh masyarakat Aceh dengan berbagai konsensus moral yang diciptakan, tetapi juga mampu menjembatani keragaman yang datang dari berbagai subkultur yang berkembang di Aceh. Jika dilihat dari akar historis kulturalnya, selain *meunasah*, *mukim*, *gampong*, *mesjid*, tetapi juga bahkan warung kopi di Aceh misalnya bukan tidak mungkin muncul sekedar pengganti hiburan, tempat nongkrong, serta tempat berbagi informasi bagi orang-orang Aceh (Kompas, 2011: Mei). Melalui proses yang demikian natural inilah, kemudian di setiap ruangnya melahirkan bentuk-bentuk komunalitas yang kokoh di Aceh. Oleh karena itu, proses budaya yang berkembang demikian natural ini harus dihargai sebagai narasi budaya yang memiliki peran penting bagi transformasi ruang yang kini sedang menggejala di tanah rencong ini.

Bentuk-bentuk *public space* semacam ini, disadari atau tidak telah menjadi tanda yang mengukuhkan sebuah identitas baru (Edelmen, 2001: 201), melalui bertemunya beragam orang, lembaga, status sosial dan bahkan identitas yang multikultur sekalipun. Pada tingkat pergeseran mode seperti ini, penciptaan narasi kebudayaan yang melintasi batas-batas teritori kebudayaan Aceh, di satu sisi, warung



kopi juga bahkan mampu menjadi perekat budaya yang dapat diterima oleh berbagai tingkat sosial yang berbeda. Namun di sisi yang lain, bentuk-bentuk penciptaan ruang publik semacam ini juga bagian dari proses perubahan eskalasi budaya yang kini mulai merangkak pada pencarian identitas baru, khususnya pada generasi paling aktif yaitu anak muda kota Aceh. Sejalan dengan itu, tahap ini harus dibarengi dengan bentuk-bentuk pembacaan gejala perubahan kebudayaan secara lebih kritis.

Selain warung kopi, *meunasah* dan *mesjid* misalnya, keduanya juga memiliki peran kebudayaan yang tidak kalah pentingnya terutama dalam menjawab tantangan global ini. Di Aceh Hubungan *meunasah* dengan mesjid dalam patron simbol budaya adat Aceh, telah dimaknai dengan narit maja (*hadih maja*) "*Agama ngon Adat (hukum), lagei dzat ngon sifeut*". *Meunasah* adalah sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat, karena saling membutuhkan kesejahteraan sesama manusia dalam komunitas *gampong* (antar *gampong*), sehingga melahirkan adat, adat istiadat dan tatanan adat. *Meunasah* sangat terikat dengan kehidupan *gampong*, karena *gampong* sendiri merupakan unit persekutuan masyarakat hukum yang menurut Van Vollenhoven dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh hukum. Persekutuan merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan immateril (Wignjodipuro, 1979: 85-86).

Sementara mesjid (*mesjid*) dilahirkan oleh kebutuhan mukim (beberapa *gampong*), karena kebutuhan nilai-nilai aqidah/syariat, terutama shalat Jum`at. Sejarah mukim tumbuh

dalam konteks diperlukan 40 orang untuk mendirikan shalat Jum`at (S.Hurgronje, 1985: 91). Dengan demikian, peran mesjid adalah syariat, sedangkan peran *meunasah* adalah adat yang saling bersentuhan (siklus dakwah/komunikatif) yang kemudian melahirkan suatu paduan sikap perilaku (kebersihan adat dilakukan oleh agama (mesjid) dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat (*meunasah*). Kontribusi peran *meunasah* dan mesjid dalam kehidupan sosial budaya adat Aceh, telah memperkokoh otoritas dan otonomitas dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kawasan *gampong* dan mukim. Oleh karena itu, *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh *keuchik* dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif *gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong* (Qanun No.5:2003). *Keuchik* memegang fungsi *Mono Trias Function* (manunggal tiga fungsi: eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang dibantu oleh Tuha Peut (A.J.Vleer/ PDIA, 1978: 1-4) dan Imeum *Meunasah*, beserta sekretaris *gampong* sebagai perangkat *gampong* (Badruzzaman: 2002: 34)

Terlepas dari peran normatifnya, *meunasah* misalnya juga harus dilihat sebagai bagian dari subkultur yang mempertemukan berbagai budaya dan identitas baru. Bisa dibayangkan, munculnya kultur global yang meluas di Aceh, secara pelan tapi pasti telah membentuk orientasi, mentalitas, gaya hidup (Harris, 1997: 112), dan bahkan terbentuknya struktur sejarah baru yang akan membawa masyarakat Aceh larut pada simbol-simbol politik kebudayaan semacam ini. Sehingga tidak heran, ruang publik semacam ini, pada saatnya akan menjadi agen baru bagi tumbuhnya

budaya keterbukaan di Aceh, setelah lama larut dalam jeratan konflik yang bertahun-tahun membebani kecerdasan lokal masyarakat Aceh. Dengan demikian, ia juga harus dimanfaatkan sebagai ruang budaya yang produktif dan memberi semangat inovasi bagi kecerdasan-kecerdasan lokal yang lain.

Sebagai bentuk ruang kebebasan dan keterbukaan di Aceh, *meunasah* juga tidak menutup kemungkinan melahirkan apa yang disebut oleh ahli dengan munculnya “politik ruang”, di mana ruang publik seperti ini pada gilirannya juga menjadi ajang kontestasi kekuasaan di Aceh. pemanfaatan ruang kebudayaan seperti ini juga dapat dilihat melalui beberapa hal penting sebagai penanda proses perubahan di Aceh, di antaranya: *pertama*, *meunasah* telah menegaskan identitas (Friedmen, 1995) ke-Aceh-an baru, meski dulunya juga telah menjadi pola kebudayaan yang mengakar, namun, pada konteks pasca konflik dan pembangunan Aceh, kini *meunasah* karakternya telah semakin mangakar secara kuat. Hal ini menunjukkan bahwa identitas ke-Aceh-an mulai bergeser ke arah subkultur yang produktif dan harus dikembangkan dan dikelola menjadi media komunikasi yang lebih punya nilai tawar kebudayaan.

*Kedua*, *meunasah* telah memperluas ruang kebudayaan (*cultural space*) (Appadurai, 1994:193) di Aceh. Masuknya kultur global pasca tsunami juga telah menandai berbagai warisan perubahan di berbagai tingkat, mulai dari gaya hidup, pandangan hidup, mentalitas, imajinasi, bahkan materialisasi nilai-nilai telah meluas di jantung kehidupan masyarakat Aceh. Hal yang paling mencolok untuk menggambarkan pola ini adalah ketika hampir sebagian besar NGO nasional maupun internasional sudah mulai *kukut* dari proses pembangunan Aceh, akibat yang ditimbulkannya juga membawa dampak yang tidak ringan bagi

perubahan masyarakatnya, seperti pada ketergantungan yang mulai berpengaruh pada aspek mentalitas orang Aceh, pola konsumtif mulai mengakar pada ranah anak muda kota Aceh, dan pengangguran yang juga mulai meluas di berbagai tingkat di kota maupun di pedesaan Aceh.

Fakta ini menunjukkan bahwa ruang kebudayaan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, tetapi ia juga bagian yang ditimbulkan oleh akibat meluasnya kultur global yang sengaja atau tidak telah melebar pada ruang-ruang kebudayaan semacam ini. Oleh karena itu, tidak heran jika *meunasah* pada suatu saat akan menggantikan ruang-ruang “kebudayaan induk” yang telah mapan sebelumnya. Keberadaannya bahkan telah menjadi bagian yang tidak saja menjadi sebuah pusat komunikasi masyarakat, tetapi ia telah memperlihatkan karakteristik kebudayaan yang mampu mendominasi akar kebudayaan yang lain di negeri syariah ini.

*Ketiga*, selain *meunasah* telah memperluas ruang kebudayaan, ia pada saatnya juga akan menjadi model bagi tempat bertemunya diversitas budaya (Green, 1995: 35) khususnya pada perkembangan kebudayaan yang sedang mengalami masa transisi panjang seperti Aceh. Bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) semacam ini tidak dapat kita temukan dan kita bentuk dengan mudah di tempat lain. Sebab supporting sistem yang berlaku di setiap ruang budaya tidak selalu memiliki karakteristik yang sama, sehingga setidaknya karakteristik mendasar dari sebuah pola perilaku, baik individu, kelembagaan, simbol-simbol budaya, nilai-nilai, hingga bahkan pilihan-pilihan hidup yang dibangun musti memiliki kemiripan (Fatherstone, 1995). Dengan demikian, berbagai bentuk aktifitas di *meunasah* telah menjadi tempat rujukan yang memiliki nilai historis kultural di Aceh, bahkan nantinya akan

menjadi jujukan tidak saja pejabat daerah atau terbatas pada individu-individu masyarakat Aceh, tapi juga para elit partai lokal-nasional, intelektual, penulis, bahkan akademisi.

Oleh karena itu, meski kehadirannya tidak menegaskan sebuah pesan atau misi tertentu, tetapi pada saatnya mau tidak mau, ruang publik semacam ini akan mengalami redifinisi yang terus menerus sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan global yang mengikutinya. Apa yang disebut dengan politik ruang – di dalam kacamata antropologi politik – bahkan juga akan terjadi di ruang-ruang sosial semacam ini. Di mana *meunasah* yang dibangun dengan akar dan karakteristik lokal, pada saatnya akan diisi dan digantikan oleh suatu ruang budaya yang bahkan mendukung suatu pola hubungan kekuasaan yang berkembang. Sehingga pada saat tertentu *meunasah* akan dibangun, dipelihara, dilestarikan, bahkan diubah menurut selera politik kebudayaan yang berkembang untuk menjamin kelestarian sebuah kelompok elit yang sedang berkuasa.

Sebagai sebuah ruang budaya, *meunasah* musti didudukkan sebagai narasi kebudayaan yang akan selalu mengalami pergeseran orientasi sekaligus maknanya. Sehingga perlu pemahaman yang lebih kritis dalam melihat gejala transformasi ruang semacam ini. Terlebih tahun-tahun belakangan ini merupakan momentum kompetisi politik pada aras lokal yang sedang bersaing ketat. Sejalan dengan itu, dengan berkembangnya ruang sosial-budaya seperti *meunasah* atau disebut *public space* di Aceh dalam studi ini, diharapkan akan mengembalikan nilai-nilai keacehan yang telah mulai menghilang, ikatan-ikatan tradisional yang melemah, termasuk pada referensi ketokohan yang mulai hilang dapat ditemukan kembali.

Oleh karena itu, bisa dibayangkan sebuah resistensi orang Aceh ketika

proses enkulturasi tidak lagi didominasi oleh agen-agen tradisional seperti orang tua, pemimpin agama, dan adat. Proses konstruksi nilai yang demikian ini, telah dilakukan dengan cara yang sangat kompetitif oleh beragam agen yang berbeda (Abdullah, 2005), mulai dari agen negara, pasar, dan masyarakat sendiri. Di mana seharusnya lebih menentukan pola anutan yang dikembangkan sebagai narasi yang diciptakan melalui *local genius* masyarakat Aceh. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk-bentuk *public space* seperti *meunasah*, mesjid, *gampong*, *dayah*, bahkan warung kopi dapat dikelola menjadi agen perubahan budaya yang mampu mengembalikan Aceh dari masa-masa krisis semacam ini.

Pada batas yang demikian itu, tidak heran jika belakangan ini ada persoalan krusial yang penting untuk dicermati yang melibatkan persoalan ekonomi politik, serta sosial budaya, yaitu:

*“terjadi antara salah satu anggota dewan dengan mahasiswa. Saat sekelompok mahasiswa yang berasal dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Pantai Barat Selatan (FPMP-BAS) dan Forum Bersama Mahasiswa Poros Leuser (FBMP Leuser) yang datang ke DPRA, mengaku tidak begitu lancar dalam bahasa Aceh sehingga meminta agar komunikasi dengan salah satu anggota dewan tersebut dilakukan dalam bahasa Indonesia. Namun, anggota dewan tersebut menolak dan menyebut para demonstran sebagai demonstran yang tidak jelas, bukan orang Aceh. (Harian Aceh 16/02/2011 dan 18/02/2011)”*.

Persoalan yang demikian ini tidak saja menjelaskan perdebatan soal identitas ke-Aceh-an, juga bukan pula tidak hanya menyangkut pluralitas etnis di Aceh, tetapi juga menyangkut persoalan nasionalisme dan kebangsaan yang mestinya direspon secara kritis. Oleh karena itu, hubungan

dialektis antara identitas lokal dan global membawa beban historis yang beragam di Aceh. Benturan paradigma dalam mengelola diversitas kelompok di Aceh merupakan suatu fakta terbatasnya “ruang publik” yang diciptakan. Gesekan antar aliran atau kelompok Islam baru-baru ini misalnya adalah suatu bagian kecil dari konflik identitas yang kurang mendapatkan sentuhan ruang publik secara maksimal, sehingga identifikasi terhadap diversitas kelompok Islam tidak terbangun dengan efektif. Pada batas inilah sistem sosial suatu masyarakat tengah mengalami disfungsi sosial yang tidak lain sebagai akibat dari kluster-kluster sosial yang tumbuh secara masif dan dalam pengelolaan ruang publik yang terbatas (Hall, 1990: 97). Oleh karena itu pula, pertumbuhan kelompok-kelompok Islam secara bebas itu harus dikelola dengan dihidupkannya ruang publik secara bersama-sama, sehingga seperti memanfaatkan ruang budaya, menciptakan ruang inklusifitas yang lebih terbuka, membuka batas-batas eksklusifitas dalam kelompok-kelompok sosial adalah bagian dari cara mengelola perbedaan diversitas kelompok yang ada. Sehingga tidak terlalu terburu-buru menggunakan standarisasi penyekatan bagi kelompok yang tidak sehaluan dengan pandangan *mainstream*.

### **Aceh Baru Inspirasi untuk Kebangkitan Lokal: Identitas Aceh yang Dialogis dan Negosiatif**

Setelah mendiskusikan bagaimana ruang publik telah membangunkan Aceh dari tidur panjangnya akibat derita konflik dan tsunami yang sampai 10 tahun belakangan ini masih terasa dampaknya. Ruang publik yang dibangun dari akar kultural keacehan ini kemudian dihidupkan kembali dengan mengambil dukungan dari berbagai aktifitas sosial dan kultural kapital Aceh yang ada.

Selanjutnya, bagaimana modal sosial yang dimiliki Aceh dapat ditransformasi ke dalam berbagai kemungkinan peluang-peluang strategis, di mana globalisasi didudukkan sebagai partner kerja yang bersifat konstruktif, sehingga globalisasi tidak saja secara liar beroperasi dalam mekanisme globalnya sendiri, tetapi ia juga harus tunduk pada aturan main lokal yang mau tidak mau keduanya harus bisa saling menyeimbangkan antara kultur, identitas, dan kepentingan masing-masing.

Mekanisme yang demikian ini sangat berbeda dengan model kebangkitan Aceh pada masa kerajaan/kasultanan awal. Hubungan antara lokal dan global tidak ditunjukkan secara dialogis, maupun negosiatif yang seimbang dengan saling mengangkat keseimbangan antara kultur, identitas, dan kepentingan. Namun kebangkitan pada era kasultanan Aceh cenderung bersifat antagonis-konfrontatif yaitu diperlihatkan dengan bentuk-bentuk perlawanan. Dapat ditunjukkan misalnya, ketika wilayah Aceh sudah merdeka penuh sebelum 1873, tetapi penentangan terhadap basis bangsa asing terus dilakukan, terutama bagaimana masa kesultanan Sultan Ali Mughayat Syah terhadap pelabuhan-pelabuhan di belahan utara Sumatra. Sultan yang pertama memerintah di Aceh dan yang pertama pula memeluk dan mengembangkan agama Islam. Aceh disatukan oleh sebuah dinasti Muslim yang bertekad mengeliminasi intervensi asing. Kebangkitan Aceh justru terjadi ketika melakukan perlawanan terhadap invasi Portugis ke wilayah Aceh. Kepentingan perlawanan terhadap intervensi asing menjadi *raison d’etre* bagi eksistensi kesultanan Aceh selama berabad-abad (Reid, 2006:113).

Kebangkitan Aceh pada gelombang kedua ini diperlihatkan dengan cara-cara dialogis dan negosiatif dengan asing. Asing sebagai kekuatan global pada era

ini menjadi partner yang dapat saling memajukan Aceh dari berbagai sisi kehidupan Aceh. Bidang ekonomi, sosial, budaya tentunya merupakan bidang yang berlahan-lahan mendapatkan tempat bagi kelangsungan proses negosiasi yang diciptakan. Selain itu, ada beberapa hal dibidik sebagai entitas yang sedang dihidupkan kembali di Aceh sebagai bentuk sinergi “lokal-global” yang layak diangkat kembali, terutama dalam proses rekontekstualisasi modal sosial dan kultural Aceh.

Beberapa hal secara rinci dapat disebutkan tentang modal sosial dan kultural Aceh, antara lain: a). Apa yang disebut sebut dalam penulisan ini sebagai kearifan lokal (*local wisdom*), b). Selain kearifan lokal bisa juga disebutkan tentang aneka ragam ruang publik (*public space*) yang perannya sedang dihidupkan kembali di Aceh seperti *muenasah*, *gampong*, mesjid, bahkan ruang budaya warung kopi yang kini telah eksis dan ramai dikunjungi beragam orang, c). Basis sosial (*social base*) juga merupakan bagian dari peta kekuatan identitas Aceh yang tidak dapat dianggap remeh yaitu berupa kelembagaan-kelembagaan tradisional, seperti tokoh masyarakat, orang tua, lembaga adat, ataupun lembaga agama. Tiga kekuatan *civil society* Aceh ini disadari atau tidak telah membentuk akar kesejarahan yang kuat di Aceh, sehingga bangunan sosial dan kultural ini meskipun pernah mengalami keretakan (Abdullah, 2005) pada saat konflik Aceh, kini faktanya sedang dihidupkan dan dilekatkan kembali sebagai bentuk atau wujud Aceh baru dan bermartabat. Seperti ditegaskan oleh ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Banda Aceh:

*“Salah satu program MAA adalah melakukan advokasi gampong, di mana potret kehidupan asli aceh masih dapat dilihat di sana, paling tidak belum banyak terkontaminasi oleh kehidupan global pasca tsunami. Seperti ritual-*

*ritual gampong masih sering kita temukan di kehidupan gampong di Banda Aceh”(Wawancara dengan Ketua MAA Badruzzaman Ismail, 2009)*

Sebagai sebuah kekuatan yang dirawat langsung oleh masyarakat atau *civil society* ini dapat menjadi kekuatan budaya yang berbasiskan kelembagaan masyarakat atau bahkan komunitas (Hall, 1990: 201). Manajemen kelembagaan budaya semacam ini biasanya tidak terorganisir dengan rapi, tetapi kini di Aceh mulai dibangkitkan kembali melalui pelembagaan basis-basis sosial maupun budaya yang dirawat melalui Qanun, yaitu misalnya Qanun: No. 9 tahun 2008 yang menjelaskan tentang pemformalan kearifan lokal dalam sebuah Qanun. Terlepas apakah dalam praktiknya kemudian kearifan lokal akan tetap mendapatkan pengakuan hukum seperti sebelum diformalkan dalam qanun, ataukah pengakuan itu justru dapat melunturkan semangat kearifan masyarakat?

Pelembagaan basis-basis sosial budaya ini jika diamati lebih jauh di satu sisi secara struktural memberikan keuntungan positif, karena ia secara formal terjaga oleh suatu kekuatan hukum yang berbentuk qanun, sehingga sebagai produk lokal, kearifan lokal akan tetap terpelihara baik dari keasliannya maupun dari status identitas keacehan, yang tidak bisa diklaim oleh daerah lain. Namun di sisi lain secara kultural, dalam praktiknya kearifan lokal membawa beban historis-kultural yang tidak semua orang bisa merasakan kekekatan kultural akan sebuah praktik sosial yang demikian penting ini.

Basis sosial yang pada perkembangannya juga telah menjadi modal sosial (*social capital*) ini, pada batas tertentu seyogyanya menunjukkan daya kritis, meski tidak perlu berhadapan secara ketat dengan globalisasi.

Harus disadari bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, pelibatan global juga mewariskan pengembangan Aceh yang strategis dan cepat. Meski dalam batas yang lain globalisasi seringkali melewati batas-batas teritori kultural yang sudah ditentukan sebagai arena kontestasi dalam masyarakat. Sehingga apa yang menjadi komitmen dari awal dalam studi ini selalu ditekankan perlunya negosiasi antara lokal dengan global, di mana juga penting adanya formulasi-formulasi yang diciptakan kedua belah pihak agar menemukan keseimbangan antar kepentingan.

Sebuah pernyataan aktivis Komite Peralihan Aceh (KPA), Nazar yang menyatakan bahwa: "kurikulum pengembangan masyarakat ke depan di Aceh harus berbasis lokal dengan juga memasukkan tema ke-Islam-an dan ke-Aceh-an, di samping tema gerakan sosial baru, perdamaian, komunikasi publik, dan penguatan jejaring. Ini untuk mengantisipasi kerusakan Aceh yang lebih parah ke depan. Jangan sampai Aceh ke depan digadaikan oleh kelompok donatur yang tidak memedulikan adat istiadat dan agama di Aceh".

Pandangan senada juga muncul misalnya dari Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA), Teuku Kemal Fasya menyatakan bahwa: "hasil dari penulisan partisipatif para fasilitator di masyarakat pesisir memberikan sinyal bahwa masyarakat sudah cukup kritis dengan keberadaan NGO di Aceh. Jika dahulu masalah pembangunan ada pada kebijakan politik Orde Baru yang sentralistik, kini mengarah pada jaringan global bantuan yang dianggap merenggut keindahan gampong Aceh masa lampau. Masyarakat Aceh semakin rindu dengan romantika gampong Aceh yang permai dan seimbang secara kultural dan agama."

Khawatiran dari pernyataan dua intelektual dan tokoh masyarakat

di atas seyogyanya dipahami sebagai a). Kerinduan akan Aceh yang damai dan kondusif, tidak lagi ada konflik, apalagi konflik baru yang diciptakan melalui situasi yang tidak kondusif pasca tsunami, b). Bahkan sebuah harapan kebangkitan Aceh yang tidak lagi dijajah oleh rejim apapun, termasuk para agensi global yang meraup kepentingan lewat jalur-jalur kapitalisme yang demikian ekstrem, c). Sebuah perjuangan yang berpihak pada kecerdasan lokal. Hal ini tidak berarti kekuatan global tidak diizinkan menjamah pada ranah lokal, tetapi kecerdasan global harus beroperasi melalui mekanisme yang ditentukan oleh dan atas negosiasi di antara kekuatan-kekuatan berbagai pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, dalam praktik negosiasi yang diciptakan, setidaknya mampu menggambarkan kecenderungan adanya keberpihakan global pada kekuatan-kekuatan lokal seperti bentuk-bentuk basis sosial dan kultural yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Begitu juga sebaliknya kekuatan-kekuatan lokal harus mampu menggambarkan dukungan penuh pada kekuatan-kekuatan global yang akan membangun bersama-sama menuju perubahan lokal yang dinamis dan mampu memberi akses selebar-lebarnya pada kedua kepentingan untuk sebuah perubahan lokal yang terus dilekatkan pada kedaulatan lokal, baik berbasis pada adat istiadat, agama maupun, kearifan lokal.

## Penutup

Kedatangan beragam negara, ataupun lembaga-lembaga donor pada saat pembangunan Aceh, dan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, budaya, ideologi, gaya hidup, perbedaan seseorang dalam praktik penggunaan barang-barang globalisasi seperti barang-

barang informatika dan teknologi, menunjukkan bahwa masyarakat telah secara sadar atau tidak sadar terlibat dalam interaksi yang panjang mulai dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, proses perdamaian, sampai proses pembangunan Aceh bangkit.

Gerakan renegotiasi ruang-ruang publik menjadi ajang kontestasi baru dalam arena kegiatan sosial-politik, budaya, serta ekonomi masyarakat lokal Aceh. Sebagai sebuah ruang budaya, ruang publik seperti *meunasah*, *gampong*, *dayah*, *mesjid*, serta bahkan *warung kopi* sekalipun musti didudukkan sebagai narasi kebudayaan yang akan selalu mengalami pergeseran orientasi sekaligus maknanya, baik ke arah ruang politik, ruang budaya, bahkan ekonomi. Sejalan dengan itu, dengan berkembangnya ruang sosial-budaya seperti *meunasah* atau disebut *public space* di Aceh, diharapkan akan mengembalikan nilai-nilai ke-Aceh-an yang telah mulai menghilang, ikatan-ikatan tradisional yang melemah, termasuk pada referensi ketokohan yang mulai hilang dapat ditemukan kembali. Sehingga harapannya adalah bagaimana bentuk-bentuk *public space* seperti *meunasah*, *masjid*, *gampong*, *dayah*, bahkan *warung kopi* dapat dikelola menjadi agen perubahan budaya yang mampu mengembalikan Aceh dari masa-masa krisis semacam ini.

Transformasi identitas Aceh juga merupakan gerakan intelektual penting untuk dilakukan dalam membangun Aceh yang lebih baik, berdaulat dan bermartabat. Salah satu basis nilai yang penting untuk merepresentasi kekuatan lokal adalah basis sosial (*social base*) yang pada perkembangannya juga telah menjadi modal sosial (*social capital*) yang aktif. Oleh karena itu, pada batas tertentu seyogyanya Aceh berani menunjukkan daya kritis yang ideologis, meski tidak perlu berhadapan-hadapan secara ketat dengan globalisasi. Harus disadari bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, pelibatan global juga mewariskan pengembangan Aceh yang cepat dan strategis. Meski dalam batas yang lain globalisasi seringkali melewati batas-batas teritori kultural yang sudah ditentukan sebagai arena kontestasi dalam masyarakat. Sehingga apa yang menjadi komitmen dari awal dalam studi ini selalu ditekankan perlunya negosiasi antara lokal dengan global, di mana juga penting adanya formulasi-formulasi yang diciptakan kedua belah pihak agar menemukan keseimbangan antar berbagai kepentingan. Sehingga transformasi identitas ke-Aceh-an yang diagendakan tidak keluar begitu saja dari aspek-aspek lokalitas ke-Aceh-an.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- *Potret Retak Komunalisme: Aceh sebagai Field of Study Kebudayaan*. Wednesday Forum CRCS. 2007
- Ali, Fachry. *Interiorisasi dan Eksteriorisasi: Refleksi Sejarah Sosial Politik Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2006.
- Appadurai, Arjun. "Global Ethnoscapes: Note and Quaries for Transnational Anthropology," dalam R.G. Fox (ed). *Recapturing Anthropology: Working in the Present*. Santa fe, NM. School of American Research Press, 1994.

- Ardana, I Ketut. "Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi," dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, 2004.
- Aspinall, Edward. *Islam and Nation. Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford California: Stanford University Press, 2009.
- Beyer, Peter. F. "Privatization and the Public Influence of Religion in Global Society," dalam Mike Featherstone (ed), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publication, 1991.
- Berger L. Petter and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: 1966.
- . *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bourdieu. Pierre. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*. New York: Columbia University Press, 1993.
- . *Dominasi Maskulin*, terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra, 1998.
- Bowen, John R. *The Transformation of An Indonesian Property System "Adat", Islam, and Social Change in the Gayo highland.* American Ethnologist 15, No 2, 1998.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "The Discourse of the Islamic State and Islamic Low in Malaysia," dalam *Asian Transformation in Actions*. Tokyo: Noippon Foundation, 2009.
- . *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Chandoke, Neera., *State and Society, Exploration in Political Theory*. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd, 1995.
- Delanty, Garard. *Communitiy*. London and New York: Routledge, 2003.
- Edelman. Marc. *Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politics, Annual Review of Anthropology*, Vol. 30, 2001. PP. 285-317.
- Friedmen, Jonathan. "Being in the World; Globalization and Localization," dalam Mike Fatherstone (ed). *Global Culture; Nationalism, Globalization, and Modernity*. London: Sage publication, 1991.
- Foucault, M. *The history of sexuality. An introduction*, Vol. 1, Alley Lane, London, 1979.
- . "Subject and Power", in *Power, Essential work of Foucault 1954-1984*, edited by James D. Faubion. Vol 3. London: pinguin book. 1994. Hal 326-348
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- . *Local Knowledge*. New York: Basic Book, 1983.
- Hall, Stuart. "Cultural Identity and Diaspora," dalam Jonathan Rutherford (ed), *Identity: community, Culture, and Difference*. London: Lawrence and wishard, 1990.
- . "The Local and Global: Globalization and Ethnicity; Old and new Identity, Old and new Ethnicity," dalam Anthony D. King (ed) *Culture, Globalization and the World System*. London: Macmillan, 1991.



- Harris, Marvin. *Cultural Materialism, The strangle for Science of Culture*. New York: Vintages Books, 1980.
- . *Culture, People, and Nature, an Introduction to General Anthropology*. New York: Wesley Education Publisher, 1997.
- Hannerz, Ulf. *Cultural Complexity*. New York: Colombia University Press, 1992.
- Hurgronje, C. Snouck. *The Acehese*. Leyden: Late E. J. Brill, 1906.
- . *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadat*, 1996.
- Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Pierre Bourdie*, terj Nurhadi 2004. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1992.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jembatan, 1995.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh; Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Matulada. *Latau, Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanudin University Press, 1995.
- Mills, C. W. *The sociological imagination*. London: Oxford University Press, 1959.
- Mujib, Ibnu. *Warkop: Transformasi Ruang Politik Kebudayaan, Sebuah Catatan Etnografis*. Aceh: The Aceh Institute, 2009.
- . "Pergeseran Ruang Politik, Sebuah Catatan Etnografis Aceh," *Serambi News*, 19 Mei 2009..
- Nugroho, Heru (dkk). *Partisipasi, Kohesi sosial, dan Resolusi Konflik, Pengalaman dari Wamena Papua*. Yogyakarta: CSIS, 2006.
- Reid, Anthony. *An Indonesia Frontier; Acehese and Other History of Sumatra*. Singapore: Singapura University Prees, 2005.
- . *Verendah of Violence, The Background of the Aceh Problem*. Singapore: NUS Press, 2006.